



TAJUK RENCANA

Solusi Sampah Harus Komprehensif

PERSOALAN sampah di Yogya kembali mencuat dan viral di media sosial menyusul sidak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq ke depo sampah Mandala Krida beberapa hari lalu. Hanif geram dan marah-marah melihat tumpukan sampah yang ada di depo tersebut. Dengan lantanganya Hanif akan menurunkan tim ke Yogya dan memproses hukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tumpukan sampah yang dinilainya mencemari lingkungan. Point penting lainnya, Hanif menuding Pemkot Yogya tidak becus mengurus sampah.

Momen Hanif marah-marah melihat tumpukan sampah di Depo Mandala Krida menjadi viral di media sosial. Media mainstream pun ikut mengangkat isu tersebut dalam rubriknya. Kita tak perlu emosional merespons pernyataan Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq. Wajar saja bila ia geram lantaran baru sekali ini melihat tumpukan sampah di Depo Mandala Krida. Wajar pula karena depo tersebut merupakan tempat transit pengangkutan sampah untuk dibawa ke tempat lain guna diolah lebih lanjut. Pemandangan serupa sebenarnya tak jauh berbeda di depo lainnya.

Tentu ini bukan sebagai pembenaran atas menumpuknya sampah di Depo Mandala Krida yang notabene menebar bau tak sedap. Apalagi, di depan depo adalah kawasan kuliner yang ramai dikunjungi masyarakat. Kita mengakui bahwa Pemkot Yogya cukup kewalahan mengatasi sampah yang kapasitasnya mencapai 200 ton perhari, sehingga belum semuanya berhasil dikelola. Meski begitu, Pemkot terus melakukan berbagai upaya mengatasi sampah, antara lain dengan menggandeng pihak swasta.

Kita yakin Hanif belum mengetahui dan memahami persoalan

sampah di Yogya secara komprehensif, sehingga responsnya sangat emosional ketika melihat sampah yang menumpuk di Depo Mandala Krida. Respons Hanif yang hendak menindak secara hukum pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan sampah di Yogya, terkesan menyederhanakan masalah. Masalah sampah di Yogya bukan 'sekadar' masalah hukum, tapi banyak aspek yang terkait, mulai dari ketersediaan lahan, peralatan pengolahan hingga budaya masyarakat. Kita harus mengakui, keterbatasan lahan di kota dan minimnya peralatan pengolahan menjadi kendala utama.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga tak pernah mengucurkan bantuan untuk pengelolaan sampah di Yogya, sehingga Pemkot masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berkenaan itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah memanggil Pj Walikota Yogyakarta Sugeng Purwanto dan Sekda Kota Yogya Aman Yuriadijaya menyusul insiden Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq yang marah-marah saat sidak di Depo Sampah Mandala Krida beberapa hari lalu. Gubernur meminta mereka untuk memberi klarifikasi ke Menteri LHK tentang masalah yang sebenarnya terjadi (KR 20/11).

Kalau perlu, Pj Walikota dan Sekda datang ke Jakarta untuk memberi penjelasan langsung kepada Menteri LHK agar tidak salah paham. Kita mendukung upaya itu, karena persoalan sampah di Yogya tak sesederhana yang disampaikan Menteri LHK. Bahwa upaya membenahi sampah di Yogya sedang berproses, apalagi dalam waktu dekat ini segera dipasang insinerator baru di TPA Piyungan yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah secara bertahap. **J - d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005